

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Sindo

APBD 2023 Fokus Penanganan Banjir dan Kemacetan

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengingatkan jajarannya terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 harus fokus terhadap penanganan banjir hingga antisipasi resesi. DPRD DKI bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI diketahui mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 pada 31 Oktober hingga 3 November 2022.

"Kepada jajaran DPRD DKI Jakarta, saya telah mengingatkan bahwa setiap anggaran kegiatan pemerintah tahun depan harus fokus menuntaskan dua masalah besar Jakarta, yakni banjir dan kemacetan. Kemudian pemulihan ekonomi serta antisipasi menghadapi resesi. Tidak ada lagi program kerja khayalan, semua harus tepat sasaran sesuai dengan kajian, inventarisir kebutuhan, hingga kondisi di lapangan," kata Pras—sapaan akrab Prasetyo Edi Marsudi.

Pras mengatakan, ada peningkatan sejumlah proyeksi pendapatan. Hal itu membuat TAPD DKI mengusulkan anggaran Rp85,57 triliun kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI. "Secara garis besar terjadi peningkatan sejumlah proyeksi pendapatan sehingga

besaran kebijakan umum APBD tahun 2023 yang diusulkan kepada Badan Anggaran DPRD DKI mencapai Rp85,5 triliun," ucapnya.

Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan ini berharap kerja DPRD dan Pemprov DKI dapat membuahkan hasil dan bermanfaat bagi masyarakat Jakarta. "Semoga sinergi kerjasama DPRD dan Pemprov DKI Jakarta ini membuahkan hasil yang bermanfaat dan dirasakan dampak baiknya bagi semua masyarakat Jakarta. *Aamiin yarabba'alamin*," ucapnya.

Pemprov DKI Jakarta menjadikan penanggulangan banjir, penuntasan kemacetan, dan antisipasi resesi ekonomi diprioritaskan dalam KUA-PPAS APBD Tahun 2023. Rincian anggaran penanggulangan banjir Rp1,29 triliun, penanganan kemacetan Rp625 miliar, kemudian antisipasi resesi ekonomi Rp120 miliar.

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai postur tersebut belum mampu mengeksekusi dengan baik tiga program prioritas yang diusung tahun 2023. "Keseriusan dilihat dari anggaran. Kesan *copy paste* masih ada. Perlu diimbangi pada walikota agar jangan ragu membuat terobosan untuk menyelesaikan permasalahan secara permanen," ujar Khoirudin.

Dia berharap seluruh wali kota dan bupati membuat terobosan baru yang dapat merealisasikan target penyurutan penanganan air maksimal 6 jam, melebarkan ruas jalan yang sebanding dengan pertumbuhan kendaraan, serta meningkatkan pelatihan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menekan angka pengangguran. "Harapannya, keluhan masyarakat terhadap banjir tidak sekencang hari ini. Lalu, mengadakan pelatihan yang bukan hanya seremonial, tapi juga tidak dipikirkan tindak lanjut setelahnya. Itu yang kita sayangkan harus kita kawal dari awal perencanaan sampai betul-betul mereka bisa berusaha sendiri," ucapnya.

Sebelumnya TAPD Pemprov DKI mengusulkan rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp85,57 triliun kepada Banggar DPRD DKI Jakarta. Ketua TAPD Provinsi DKI Jakarta Marullah Matli menekankan, pihaknya telah melakukan kajian, pertemuan dengan beberapa kementerian terkait, inventarisasi kebutuhan, hingga kunjungan lapangan. Ia berharap kegiatan yang diusulkan tahun depan tepat sasaran.

"Kami telah melakukan inventarisasi kegiatan mana yang

perlu ditebalkan dan ditambahkan, untuk bahan saat pembahasan dengan DPRD. Kegiatan tersebut antara lain penanganan banjir, kemacetan, dan tata kelola lingkungan, termasuk program Bedah Kampung," kata Marullah.

Dalam usulan TAPD proyeksikan pendapatan sepanjang 2023 sebesar Rp77,44 triliun. Dengan rincian mulai dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp57,23 triliun, pendapatan transfer Rp16,93 triliun, selain pendapatan daerah yang sah Rp3,27 triliun. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp8,12 triliun yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya Rp6,70 triliun, dan penerimaan pinjaman daerah Rp1,42 triliun.

Sedangkan postur belanja dengan nilai Rp77,37 triliun yang diproyeksikan untuk belanja operasi Rp63,17 triliun, belanja modal Rp10,64 triliun, belanja tidak terduga (BTT) Rp3,19 triliun, dan belanja transfer Rp356,44 miliar. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp8,19 triliun yang terdiri atas penyertaan modal daerah (PMD) Rp6,23 triliun, pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp1,78 triliun, dan pemberian pinjaman daerah Rp176 miliar.

□ SINDOnews.com